

# DIPLOMASI KEMANUSIAAN INDONESIA TERHADAP MYANMAR DI BAWAH PRINSIP NON-INTERVENSI ASEAN

Munadia Ikhsani

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract:** This research concern with Indonesian Humanitarian Diplomacy to Myanmar in Rohingya Ethnic conflict under the Asean Non-Intervention principle. Indonesia and Myanmar hold the principle of non-intervention which is the basic principle of ASEAN in the ASEAN Charter. The principle of non-intervention is so rigid and it makes difficulty to reach human rights enforcement in ASEAN countries and this matter are related to the ethnic Rohingya problem in Myanmar. However, in Myanmar's closed attitude and negative response to other countries who wants to end Rohingya's conflict, Indonesia managed to conduct diplomacy to Myanmar in efforts to end Rohingya ethnic conflicts, through Humanitarian Diplomacy. This Research purpose to explain the ways of Indonesian Humanitarian diplomacy to Myanmar to help Rohingya Ethnic. This research supported with neorealist Perspective, and Multitrack Diplomacy theory. This research conducted by using qualitatives methode by compiling secunder datas through library research. The datas are obtained from books, journal, social articel and website. Indonesian Humanitarian Diplomacy to Myanmar in the case of Rohingya ethnic conflict are implemented with in three ways that the first way is Humanitarian Diplomacy by Constructive Engagment through Indonesian Soft Power, the second way is Humanitarian Diplomacy through Capacity Building, and the third way is Humanitarian Diplomacy throught Reconciliation Efforts.

**Abstrak:** Penelitian ini berkaitan dengan Diplomasi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar dalam konflik etnis Rohingya di bawah asas Non-Intervensi Asean. Indonesia dan Myanmar memegang prinsip non-intervensi yang merupakan prinsip dasar ASEAN dalam Piagam ASEAN. Prinsip non-intervensi sangat kaku dan membuat sulit untuk mencapai penegakan HAM di negara-negara ASEAN dan hal ini terkait dengan masalah etnis Rohingya di Myanmar. Namun, dalam sikap tertutup Myanmar dan tanggapan negatif terhadap negara-negara lain yang ingin mengakhiri konflik Rohingya, Indonesia berhasil melakukan diplomasi ke Myanmar dalam upaya untuk mengakhiri konflik etnis Rohingya, melalui Diplomasi Kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara diplomasi Kemanusiaan Indonesia ke Myanmar untuk membantu etnis Rohingya. Penelitian ini didukung oleh Perspektif neorealis, dan teori Diplomasi Multitrack. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menyusun data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari buku, jurnal, artikel sosial dan situs web. Diplomasi Kemanusiaan Indonesia ke Myanmar dalam kasus konflik etnis Rohingya diimplementasikan dengan tiga cara, yang pertama adalah Diplomasi Kemanusiaan melalui Keterlibatan Konstruktif melalui Soft Power Indonesia, yang kedua adalah Diplomasi Kemanusiaan melalui Peningkatan Kapasitas, dan yang ketiga adalah Diplomasi Kemanusiaan Upaya Rekonsiliasi.

**Kata Kunci:** diplomasi kemanusiaan, konflik Rohingya, Myanmar

## PENDAHULUAN

Genosida yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar telah menarik perhatian dunia internasional. Kekerasan tersebut telah menewaskan ratusan bahkan menelantarkan lebih dari 140.000 jiwa. Konflik etnis yang terjadi di Myanmar ini merupakan konflik sektarian antara etnis Rohingya yang sebagian besar adalah Muslim dan Rakhine yang merupakan etnis mayoritas penganut Buddha. Rohingya sendiri merupakan kelompok minoritas Muslim yang ada di negara bagian Rakhine, yang menempati bagian barat pantai Myanmar.

Keberadaan kelompok minoritas *ethno-religius* ini resmi mengalami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar sejak tahun 1982 dengan keluarnya UU kewarganegaraan yang menyatakan menolak akses kewarganegaraan minoritas Rohingya atau tidak diakui sebagai etnis di Myanmar.

Perlakuan diskriminatif terhadap Etnis Rohingya disebabkan oleh status mereka yang berbeda. Tidak seperti etnis lain, Etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar melainkan sebagai pendatang ilegal. Pelanggaran-pelanggaran yang di-

lakukan terhadap Etnis Rohingya, seperti tidak diberikan izin usaha; pengenaan pajak yang tinggi dan berlebihan hanya kepada Etnis Rohingya - jika pajak tersebut tidak mampu dibayarkan, maka lahan pertanian, tambak, atau properti apapun yang mereka miliki akan disita; diperlukan izin untuk keluar dari otoritas lokal; khusus bagi Etnis Rohingya yang terkonsentrasi di Rakhine utara, mereka dimasukkan ke dalam kamp-kamp, dieksploitasi sebagai pekerja paksa; tidak diberikan akses untuk pendidikan; sulitnya mendapatkan izin perkawinan; pelecehan seksual terhadap perempuan Rohingya; serta penahanan tanpa melalui proses peradilan. Selain faktor historis, akar penindasan terhadap Etnis Rohingya juga dapat ditemui dalam konstitusi - termasuk di dalamnya, berbagai amandemen dan penambahan peraturan baru oleh masing-masing rezim berkuasa di Myanmar yang tidak mengakui eksistensi etnis Rohingya.

Minoritas Rohingya telah mengalami ketidakadilan, kerusakan fisik serta mental. Dalam kekerasan yang terjadi pada tahun 2012, 140.000 pengungsi Rohingya telah dipaksa keluar dari rumah mereka. Selain itu, terjadi pembatasan terhadap etnis Rohingya dalam hal pekerjaan dan kebebasan beragama. Serangan tahun 2012 tersebut juga dianggap sebagai bentuk tindakan pembersihan etnis, karena banyaknya korban jiwa berada di pihak etnis Rohingnya. Apa yang dialami etnis Rohingya merupakan bentuk pelanggaran HAM dan ASEAN harus dapat bertindak untuk menghentikan genosida tersebut.

ASEAN memiliki mekanisme sendiri dimana mekanisme penyelesaian konflik di kawasan Asia Tenggara dilandasi prinsip non-intervensi sebagai sesama anggota ASEAN, Indonesia dan Myanmar memegang prinsip non-intervensi yaitu melarang negara anggota mencampuri urusan domestik anggota ASEAN lain. Bagi negara-negara anggota ASEAN, prinsip non-intervensi adalah sebagai jaminan keamanan, kedaulatan, dan kebebasan dalam berhubungan dengan negara tetangga. Tetapi, dalam perkembangannya, prinsip non-intervensi menjelma begitu kaku dan justru

menyabotase upaya-upaya kolektif penegakan HAM di negara-negara ASEAN dan hal ini tercermin dalam kasus etnis Rohingya di Myanmar.

ASEAN bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik di Myanmar namun terhambat oleh prinsip Non-Intervensi ASEAN tersebut. Namun dalam hambatan prinsip non-intervensi dan sikap tertutup serta respon negatif Myanmar, Indonesia berhasil melakukan diplomasi terhadap Myanmar demi upaya membantu menyelesaikan konflik etnis Rohingya yaitu lewat diplomasi kemanusiaan. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang merupakan anggota ASEAN yang mendapat respon positif dari otoritas Myanmar sehingga memiliki akses untuk bertemu dengan Pemerintah Myanmar dan membahas persoalan Rohingya. Indonesia menunjukkan sikap yang berbeda yaitu dengan tidak dengan mengecam maupun hanya diam, yaitu dengan melakukan diplomasi kemanusiaan.

## **METODE**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu melalui tesis, jurnal dan artikel dan analisis dokumenter guna mengungkapkan informasi-informasi yang ada dalam bidang kajian tertentu. Secara lebih khusus, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis pidato kenegaraan ataupun wawancara terbuka Presiden RI Joko Widodo dan juga Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi terkait kepedulian dan langkah Indonesia terhadap etnis Rohingya sebagai negara terbesar di ASEAN, negara muslim terbesar serta konstitusi UUD dalam menjaga perdamaian dunia melalui diplomasi kemanusiaan terhadap Myanmar. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini mengacu pada tujuan penelitian yakni untuk mendapatkan penjelasan Bagaimana diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia terhadap Myanmar dalam kasus etnis Rohingya selama tahun 2012-2018.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Diplomasi Kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar dalam kasus etnis Rohingya

mengimplemastikan *teori Multitrack Diplomacy*, yaitu melalui *track* pertama atau negara, *track* ketujuh yaitu agama, dan *track* kedelapan yaitu filantropis/pendanaan. Diplomasi kemanusiaan Indonesia terhadap Myanmar melalui *multitrack diplomacy* dilaksanakan dengan tiga cara yaitu Diplomasi Kemanusiaan dengan Pendekatan Konstruktif melalui *Soft Power*, Diplomasi Kemanusiaan Melalui Pembangunan Kapasitas, dan Diplomasi Kemanusiaan Melalui Upaya Rekonsiliasi, dimana dalam rekonsiliasi ini *track* tujuh dan delapan terlibat.

### **Diplomasi Kemanusiaan dengan Pendekatan Konstruktif/*Constructive Engagement* melalui *Soft power***

Dalam melakukan diplomasi kemanusiaan melalui *multi track diplomacy*, Indonesia yang merupakan *track* pertama dalam *multitrack diplomacy* menggunakan *power* nya terhadap Myanmar agar bisa menembus prinsip non-intervensi dan melakukan pendekatan konstruktif. *Power* negara tetap diperlukan dan dalam kasus ini Indonesia memiliki *Soft Power* terhadap Myanmar, dan karena memiliki *Soft Power* inilah Indonesia menjadi satu-satunya negara yang diterima Myanmar untuk berdialog pada saat konflik di tahun 2017. Indonesia dapat bernegosiasi dengan Myanmar sehingga akses bantuan yang terisolasi bisa masuk ke Rakhine State. Hubungan bilateral dan persahabatan Indonesia merupakan *soft power* Indonesia terhadap Myanmar. Indonesia membantu proses demokratisasi di Myanmar. Pengaruh Indonesia yang sangat penting bagi demokratisasi Myanmar dan menjadi *Soft Power* Indonesia terhadap Myanmar adalah melalui keikutsertaan Myanmar Bali Democracy Forum (BDF) sebagai forum yang membahas tentang praktik demokrasi di berbagai negara. Bali Democracy Forum adalah forum tahunan antar negara pertama di Asia yang membicarakan dan belajar tentang praktik berdemokrasi. Forum ini pertama kali diselenggarakan pada Desember 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kegiatan ini dinaungi oleh

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia. Sebagai forum tahunan, penyelenggaraan BDF dibantu oleh Institute for Peace and Democracy (IPD) di Universitas Udayana. IPD juga hadir sebagai lembaga yang membantu Kemlu untuk merealisasikan gagasan dari BDF disetiap tahunnya. BDF inilah yang membantu proses transisi demokrasi Myanmar dan berperan sebagai forum yang mendukung kondusifitas regional guna menumbuhkan semangat demokrasi di Myanmar. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia bersama dengan IPD (Institute for peace and democracy) melalui BDF turut aktif dalam membangun sistem *good governance* Myanmar.

Selain itu yang menjadi *soft power* Indonesia terhadap Myanmar adalah keberadaan Indonesia *International School of Yangon (IISY)* tidak dapat dipungkiri merupakan *soft power diplomacy* Indonesia terbaik saat ini di Myanmar. IISY memiliki 448 peserta didik Non-WNI (Myanmar dan Warga Negara Asing lainnya) dan 46 peserta didik WNI. IISY tidak hanya berperan sebagai sarana pendidikan tapi juga untuk mempromosikan Indonesia dan menanamkan nilai-nilai demokrasi pada peserta didik dan pengajar yang sebagian besar adalah warga Myanmar.

Dalam melakukan pendekatan kostruktif, pada 2012 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengutus Menlu Marty Natalegawa untuk aktif dan bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Myanmar mengenai isu konflik etnis Rohingya. Terkait penyelesaian konflik etnis Rohingya, SBY sepenuhnya percaya bahwa pemerintah Myanmar bisa menyelesaikan konflik internal tersebut dengan baik dan lebih manusiawi. Dalam pembuatan kebijakan penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar, SBY tidak langsung mengecam Myanmar, beliau lebih memilih berkomunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah Myanmar untuk mengetahui kondisi faktual yang terjadi di Myanmar. SBY memberikan tanggapan dengan berhati-hati dan tidak menggunakan metode *hard power* karena menyadari hal tersebut dapat merusak hubungan baik Indonesia-Myanmar. SBY menge-

depankan diplomasi kemanusiaan melalui *sharing of expertise*, dan kerjasama *capacity building*. Jika ditinjau dari arah politik luar negeri Indonesia di era SBY yaitu “*all direct foreign policy*”, dan slogan “*a million friends zero enemy*”.

Pada saat konflik kembali meletus pada Agustus 2016, Presiden ketujuh, Joko Widodo menugaskan menteri luar negeri Retno Marsudi untuk menjalankan misi diplomasi. Melalui kementerian luar negeri Republik Indonesia, pemerintah Indonesia berupaya untuk menggunakan jalur diplomasi dalam membantu mengatasi tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Sehubungan dengan penugasan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi untuk terus melaksanakan misi diplomasi di Myanmar, pada 6 Desember 2016 menteri luar negeri Retno Marsudi bertolak ke Myanmar. Kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kali ini membawa amanat dari Presiden Joko Widodo untuk membahas solusi penyelesaian konflik di Myanmar.

Menlu Retno dengan Konselor Negara Myanmar Aung San Suu Kyi melakukan pertemuan bilateral di Naypidaw, Myanmar. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno kembali menegaskan keprihatinan Indonesia dan pentingnya untuk segera mengembalikan keamanan dan stabilitas bagi upaya untuk meneruskan pembangunan yang inklusif di Rakhine. Lebih lanjut Menlu RI meminta agar akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine State dibuka secara luas. Pertemuan yang diadakan di ibu kota Myanmar, yakni Naypyidaw tersebut, juga Panglima Angkatan bersenjata Myanmar Jendral U Min Aung Hlaing. Pertemuan ini membahas mengenai solusi penyelesaian untuk tragedi kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara bagian Rakhine. Pihak Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan usulan solusi yang dikenal dengan sebutan “Formula 4+1”. Solusi “Formula 4+1” ini mencakup strategi-strategi melalui pendekatan, yaitu Pengembalian stabilitas dan keamanan menegaskan pentingnya keamanan dan stabilitas untuk mewujudkan

upaya pembangunan yang inklusif, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang tanpa memandang status etnis dan agama, memprioritaskan pentingnya pembukaan akses bagi bantuan kemanusiaan Selain keempat poin tersebut, masih terdapat 1 poin penting yakni mengimplementasikan rekomendasi dari mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan yang termuat dalam Laporan Komisi Penasihat PBB

### **Diplomasi Kemanusiaan Melalui Pembangunan Kapasitas**

#### *Pembangunan Kapasitas Kepolisian*

Peningkatan kapasitas dalam hal keamanan direalisasikan pada saat pertemuan ke-12 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) pada tanggal 31 Oktober dan 1 November 2018 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang merupakan otoritas Indonesia yang berarti merupakan track pertama dalam *Multitrack Diplomacy* melakukan Pertemuan Bilateral dengan Menteri Dalam Negeri Myanmar, Lt. Gen. Kyaw Swe dan Union Minister for the Office of the Union Government of the Republic of the Union Myanmar, U Thaug Tun untuk membahas isu mengenai *capacity building*, penanganan terorisme, dan Rakhine State. Kerja sama dalam bidang *capacity building* merupakan penanggulangan kejahatan transnasional di antara kedua negara untuk memperkuat kemampuan Kepolisian Myanmar dalam mengatasi permasalahan keamanan dalam negeri, khususnya penanganan situasi di Rakhine State.

Kapolri menyampaikan kesiapannya untuk memberikan pelatihan kepada aparat Kepolisian Myanmar melalui program Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) dan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri. Indonesia berkomitmen untuk membantu Myanmar dalam penyelesaian permasalahan di Rakhine State melalui pendekatan yang konstruktif. Indonesia dan Myanmar sepakat akan pentingnya penguatan kerja sama bilateral antara Kepolisian

Indonesia dan Myanmar. Hubungan yang erat antara Kepolisian Indonesia dan Myanmar akan memberikan kontribusi konstruktif baik pada tingkat nasional maupun internasional. Dalam pertemuan itu Kapolri menyampaikan komitmen Polri untuk membantu Kepolisian Myanmar dengan memberikan berbagai program peningkatan kapasitas berupa pelatihan penegakan hukum tindak pidana terorisme, pengamanan unjuk rasa dan penanganan huru-hara, pelatihan untuk polisi wanita, dan pelatihan pasukan perdamaian.

### *Demokratisasi*

Menteri Informasi Myanmar didampingi oleh delegasi wakil pemerintah pusat dan daerah, anggota parlemen, pemimpin komunitas Islam dan Buddha, serta ketua kamar dagang Rakhine State melakukan kunjungan ke Indonesia untuk mempelajari demokrasi dan rekonsiliasi. Kunjungan delegasi Myanmar ke Indonesia berkerjasama dengan Harvard Kennedy School for Democracy dan bertujuan meningkatkan kapasitas dan berbagi pengalaman terbaik untuk proses rekonsiliasi, perdamaian dan demokrasi di Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menerima kunjungan Menteri Informasi Myanmar U Pe Myint mengatakan bahwa Indonesia dapat menjadi tempat bagi Myanmar untuk belajar tentang demokrasi dan pluralisme, dan kunjungan delegasi Myanmar merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk membantu penyelesaian isu di negara bagian Rakhine, Myanmar. Dalam pertemuan tersebut Menlu Retno menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung proses demokratisasi dan rekonsiliasi serta pembangunan inklusif di Myanmar serta menegaskan bahwa sebagai negara tetangga dan sesama anggota ASEAN, Indonesia ingin bekerja sama membantu Myanmar dalam mengatasi masalah di Rakhine.

### **Diplomasi Kemanusiaan Melalui Upaya Rekonsiliasi**

Dalam upaya rekonsiliasi, Track kedelapan yaitu pendanaan/filantropis terlibat untuk pembangunan inklusif, dan track ketujuh

dilibatkan untuk dialog lintas agama (Interfaith Dialogue).

### ***Diplomasi Kemanusiaan Melalui Pembangunan Inklusif***

Diplomasi Kemanusiaan melalui pembangunan inklusif dilakukan melalui pembangunan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Diplomasi Kemanusiaan melalui upaya Rekonsiliasi yang dilakukan Indonesia terhadap Myanmar melalui pembangunan inklusif dilakukan agar masyarakat Rohingya dan masyarakat Budha Rakhine dapat berbaur dan merasakan manfaat bersama-sama atas pembangunan yang dilakukan Indonesia. Pengimplementasian *Multitrack Diplomacy* dalam Diplomasi Kemanusiaan melalui pembangunan Inklusif yaitu Indonesia sebagai track pertama yang mempunyai power sebagai jalan masuknya track kedelapan yaitu pendanaan untuk keberlanjutan pembangunan inklusif.

### *Pembangunan Rumah Sakit*

Pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon berperan aktif dalam memproses pembangunan Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Myaung Bwe, Rakhine State yang merupakan hasil kesepakatan antara Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dan Presiden Myanmar, Y.M. U Htin Kyaw di sela-sela pertemuan KTT ASEM ke-11 di Ulanbator Mongolia, Juli 2016. Rumah Sakit Indonesia di Rakhine merupakan bagian dari diplomasi kemanusiaan Indonesia dan juga bekerja sama bersama organisasi kemanusiaan MER-C Indonesia, yang dalam *Multitrack Diplomacy* merupakan track kedelapan yaitu pendanaan/filantropis, yang dilakukan dengan tujuan jangka panjang meredakan konflik yang ada. Ketika pertama kali masuk ke Rakhine pada tahun 2012 MER-C Indonesia. Melakukan aksi kemanusiaan dengan memberikan pengobatan kepada masyarakat baik Muslim maupun Budha. Pada tahun 2015, MER-C kembali ke Myanmar dan menginisiasi berdirinya Rumah Sakit di Rakhine. Setelah mendapatkan perizinan dari otoritas Myanmar yang pengurusannya difasilitasi oleh KBRI, maka MER-C sebagai track kedelapan segera bergerak untuk merealisasikan Rumah Sakit tersebut.

KBRI Yangon terus berkoordinasi dengan Pemerintah Myanmar, Pemda Rakhine, PMI, dan MER-C Indonesia demi terwujudnya RS dimaksud. Rumah Sakit dibangun dengan biaya sekitar USD 1,8 juta hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dan kontribusi masyarakat muslim Indonesia, Palang Merah Indonesia, umat Buddha Indonesia dan donatur swasta yang merupakan bagian dari track kedelapan yakni filantropis/pendanaan dalam *Multitrack Diplomacy*. Sementara itu perancangan desain dan konstruksi rumah sakit dilakukan oleh dengan dukungan kontraktor setempat. Proyek pembangunan rumah sakit di Myaung Bwe merupakan realisasi dari gagasan pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan pelayanan kesehatan yang bersifat “*all inclusive*” kepada seluruh masyarakat di Rakhine State, tanpa memandang suku, agama dan latar belakang.

#### *Membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia Untuk Myanmar (AKIM)*

Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar adalah aliansis yang terdiri dari 11 lembaga kemanusiaan di Indonesia dan merupakan track kedepan yaitu filantropis dalam *Multitrack Diplomacy* yang terdiri dari Muhammadiyah Disaster Management Centre, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim – Nahdlatul Ulama, PKPU Human Initiative, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Dompot Peduli Ummat – Daarut Tauhiid, LAZIS Wahdah, Laznas Lembaga Manajemen Infaq (LMI), Aksi Cepat Tanggap, Lazis Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Social Trust Fund – UIN Jakarta yang berkolaborasi dengan Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Luar Negeri) dan seluruh elemen Masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama berkomitmen membantu penanganan pemasalahan konflik kemanusiaan di Myanmar. Dalam menyelenggarakan bantuan kemanusiaan, AKIM melakukan pendekatan secara inklusif dan constructive engagement kepada komunitas Rohingya dan Rakhine, karena hakikat keduanya sama-sama hidup dalam kemiskinan dan sebagai korban konflik.

AKIM membuat suatu program yang bertujuan untuk membantu masyarakat di Rakhine State. Program bernama Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Myanmar ini diluncurkan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta pada 31 Agustus 2018. Program HASCO bertujuan untuk memberikan bantuan bagi rakyat Myanmar, khususnya di Rakhine State, dalam bidang peningkatan kapasitas, pengiriman tenaga ahli, livelihood, dan pemulihan. Bantuan donasi masyarakat Indonesia yang telah terkumpul melalui lembaga anggota AKIM.

#### *Pembangunan Sekolah*

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi sebagai track pertama yang mempunyai power dalam *Multitrack Diplomacy* meresmikan dua sekolah yang dibangun dari donasi masyarakat Indonesia yang disalurkan melalui Lembaga Kemanusiaan PKPU yang merupakan track kedelapan yang tergabung dalam AKIM. Sekolah tersebut berada di Hla Ma Chae dan Thet Kay Pyin Ywar Ma. Bagi Menlu, pembangunan sekolah ini merupakan bukti nyata dari kuatnya persahabatan masyarakat Indonesia dengan Myanmar. Secara khusus Retno, memberikan penghargaan kepada PKPU yang telah berhasil mengumpulkan dana untuk pembangunan sekolah ini. Pendirian sekolah ini di Rakhine State merupakan bentuk kerjasama yang kuat antara masyarakat dan pemerintah Indonesia bagi program Myanmar. Kemudian pada Oktober 2017 PKPU Human Initiative sebagai bagian dari Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) kembali membangun dua sekolah di Rakhine. Pembangunan sekolah baru di kawasan Muslim telah mendapatkan izin. Saat ini sudah mulai dibangun di kamp pengungsian Khan Doe Khar, tepatnya di Desa Aung Pi Ley. Selain PKPU, Rumah Zakat yang juga merupakan bagian dari AKIM terus mengupayakan agar anak-anak Rohingya di Myanmar bisa mendapatkan akses pendidikan. Setelah satu sekolah berhasil dibangun di

Khone Baung Village, Mrak U Township, Rakhine State Myanmar, 1 sekolah lagi di bangun di Nontinya IDPs, Sittwe Rakhine State Myanmar. Di Nontinya IDPs, Rumah Zakat mendirikan 1 sekolah di lingkungan yang berpenduduk 2.220 Kepala Keluarga. Di sekolah yang setara dengan sekolah dasar ini akan digunakan untuk murid sebanyak 180 anak dengan materi pembelajaran agama, bahasa dan pelajaran umum lainnya.

### ***Mengadakan Dialog Lintas Agama (Interfaith Dialogue)***

Indonesia sebagai *track* pertama dalam *Multitrack Diplomacy* menjadi fasilitator untuk mempertemukan komunitas komunitas agama yang merupakan *track* ketujuh untuk penyelesaian konflik Rohingya melalui perspektif Ketuhanan melalui *Interfaith Dialogue* (dialog lintas agama). *The 1st Indonesia-Myanmar Interfaith Dialogue* (IMID) yang merupakan kesepakatan dari pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Republik Uni Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi di Myanmar pada 21 Desember 2016, mempromosikan pluralisme dan toleransi serta memberikan landasan bagi pemimpin agama dan masyarakat sipil di Indonesia dan Myanmar untuk bersama-sama meningkatkan hubungan lintas agama dan budaya, memerangi prasangka buruk antar sesama, dan membangun kondisi yang kondusif untuk perdamaian jangka panjang.

*The 1st IMID* diselenggarakan di Jakarta dan Yogyakarta pada tanggal 21-24 Mei 2017. *The 1st IMID* dihadiri oleh sekitar 20 orang yang terdiri dari delegasi Myanmar, delegasi Indonesia, serta para peserta aktif antara lain para Biku dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Smarungga Boyolali, Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta, serta para Pejabat Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Hasil dari kegiatan ini adalah pemberian beasiswa kepada para tokoh agama Buddha di Myanmar untuk dapat belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Smarungga Boyolali dan UIN Sunan Kali-

jaga Yogyakarta di tahun 2018, penambahan 1 jumlah peserta Myanmar pada Beasiswa Darmasiswa dan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI), serta rencana penyelenggaraan Indonesia-Myanmar Youth Camp for Future Faith Leaders yang akan fokus pada hubungan antar agama di tahun 2018.

### ***Mengupayakan Repatriasi***

Pada KTT (Konfrensi Tingkat Tinggi) ASEAN di Singapura bulan November 2018, Indonesia sebagai track pertama dalam *Multitrack diplomacy* berhasil mendorong peran ASEAN dalam penanganan situasi di Rakhine State melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre). Pada tahun 2017, Indonesia menjadi motor pemberian bantuan AHA Centre di Rakhine State. Kemudian pada KTT ASEAN bulan November tahun 2018 di Singapura, Indonesia mendorong agar AHA Centre dapat diberikan akses ke Myanmar untuk memfasilitasi proses repatriasi dari Bangladesh ke Myanmar. Tindak lanjut KTT ASEAN tersebut telah dilaksanakan, AHA Centre bersama ASEAN Emergency Response and Assesment Team (ASEAN-ERAT) yang terdiri dari beberapa perwakilan negara anggota ASEAN yang dimulai dengan preliminary assessment (Tim Penilai Kebutuhan Awal) pada bulan Januari 2019.

KBRI Yangon sempat melakukan pertemuan dengan Direktur Eksekutif AHA Centre di sela-sela kunjungan AHA Centre bersama Sekjen ASEAN pada bulan Desember 2018 ke Myanmar untuk mendiskusikan Terms of Reference (TOR) dengan Pemerintah Myanmar. KBRI Yangon berkomitmen untuk mendukung AHA Centre dalam penanganan isu Rakhine State. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan kembali tiga faktor penting untuk mengubah situasi di lapangan menjadi lebih baik, yakni pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif, termasuk jaminan keamanan sehingga terdapat kepercayaan untuk kembali ke daerah asal. Lalu kedua, memajukan proses repatriasi dengan

jaminan mempertahankan situasi kondusif dan ketiga penciptaan pembangunan yang inklusif, khususnya dukungan pembangunan ekonomi.

## SIMPULAN

Cara Indonesia menggunakan diplomasi kemanusiaan merupakan cara yang tepat apabila mengingat sejarah dan hubungan persahabatan yang terjalin antara Indonesia dan Myanmar yang sudah sangat lama harus selalu dijaga. Dan tentunya hal ini juga untuk menjaga stabilitas agar tidak semakin runyam. Karena apabila Indonesia mengambil tindakan yang bermacam seperti embagro ekonomi, tentu Myanmar akan semakin menutup diri untuk menerima bantuan khususnya dari Indonesia dan berpotensi merusak hubungan kedua negara. Selain itu melalui diplomasi kemanusiaan dan kedekatan Indonesia dengan Myanmar kedepannya diharapkan dapat melobi Auu San Suu Kyi dalam dilema karena masih mendapatkan tekanan Militer, agar mau menegakkan HAM untuk etnis Rohingya, dan berani mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakhiri penderitaan etnis Rohingya walaupun sulit bahkan tidak bisa untuk merubah konstitusi 1982.

Pada akhirnya, hasil yang dicapai dari diplomasi kemanusiaan yang dilakukan Indonesia tidaklah sebagai jalan untuk mengakhiri penyelesaian konflik etnis Rohingya secara tuntas, diplomasi kemanusiaan hanya sebagai jalan untuk pengurangan penderitaan etnis Rohingya, bukan penyelesaian yang mengakhiri konflik Rohingya. Hal ini karena konflik ini adalah konflik yang sudah sangat mengakar sejak berdirinya negara Myanmar, dan sentimen terhadap Rohingya baik vertikal maupun horizontal tidak bisa dengan mudahnya dihilangkan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Fatma Arya Ardani, Kebijakan Indonesia Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine State di Myanmar (Studi Karakter Kepribadian Susilo Bambang Yudhiono), *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2015.
- General Manager DRM PKPU-HI, Eson Jumarsono, <https://nasional.sindonews.com/read/1245292/94/pkpu-kembali-bangun-sekolah-untuk-anak-anak-pengungsi-rohingya-1507097614> diakses pada tanggal 7 Maret 2019
- Hassan Wirajuda, "The Bali Democracy Forum: Setting A New Strategic Agenda For Asia" *Southeast Asia Bulletin*(CSIS Juni 2009) 1. Dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42118/2/VANNY%20EL%20RAHMAN-FISIP.pdf> diakses pada tanggal 1 Maret 2019
- <http://www.ipd.or.id/about-ipd/who-we-are> diakses pada tanggal 1 Maret 2019
- <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42118/2/VANNY%20EL%20RAHMAN-FISIP.pdf> Diakses pada tanggal 1 Maret 2019
- Hubungan Bilateral Indonesia – Myanmar , <https://www.kemlu.go.id/yangon/id/Pages/Indonesia—Myanmar.aspx> diakses pada tanggal 7 Maret 2019
- Kartika Virgianti, SBY Berdiskusi Soal Demokrasi di Bali Democracy Forum, tersedia di <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/sby-berdiskusi-soal-demokrasi-di-bali-democracy-forum>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019
- Novandre Satria & Ahmad Jamaan, "Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Indonesia dalam konflik Rakhine di Myanmar" <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1654/Jurnal.pdf>
- Syarifatul Ula, "Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar" *Journal of International Relations Undip*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2017,
- Pembangunan Rumah Sakit Bantuan Indonesia di Rakhine State Capai 70% <https://www.kemlu.go.id/yangon/id/berita-agenda/beritaperwakilan/Pages/Rumah-Sakit-Indonesia.aspx> diakses pada tanggal 8 Maret 2019.